



Hubungan Timbal Balik Politik dengan Pendidikan

Supardi¹, Haya Yumna Imin Auliya², Syifa Fauziah El Abida³, Anis Fauzi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

E-mail: supardi@uinbanten.ac.id, 242625232.hayayumnailminauliya@uinbanten.ac.id,
242625224.syifafauziahelabida@uinbanten.ac.id, anisfauzi@uinbanten.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-06-10 Revised: 2025-07-20 Published: 2025-08-09 Keywords: <i>Reciprocal Relationships; Politics; Education.</i>	This research examines the reciprocal relationship between politics and education in the context of a country's development. The background of the research shows that these two fields have an interrelated influence, where political policies affect the education system, while education plays a role in shaping people's political awareness. The research was conducted using the library research method, by analyzing various sources from books and journals related to the theme of the reciprocal relationship between politics and education. The results showed several important findings. First, politics as a system of power has a significant role in shaping education policy, including curriculum and distribution of educational resources. Secondly, education plays an important role in shaping people's political awareness and increasing political participation. Third, politics is often used as a tool to control education, especially in setting the curriculum and spreading certain ideologies. This study concludes that it is important for every country to ensure that its politics support a quality education system, and that education can create a smart and competitive society.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-06-10 Direvisi: 2025-07-20 Dipublikasi: 2025-08-09 Kata kunci: <i>Hubungan Timbal Balik; Politik; Pendidikan.</i>	Penelitian ini mengkaji hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan dalam konteks perkembangan suatu negara. Latar belakang penelitian menunjukkan bahwa kedua bidang ini memiliki pengaruh yang saling terkait, di mana kebijakan politik mempengaruhi sistem pendidikan, sementara pendidikan berperan dalam pembentukan kesadaran politik masyarakat. Penelitian dilakukan menggunakan metode library research atau riset literatur, dengan menganalisis berbagai sumber dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema hubungan timbal balik politik dengan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, politik sebagai sistem kekuasaan memiliki peran signifikan dalam membentuk kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum dan distribusi sumber daya pendidikan. Kedua, pendidikan berperan penting dalam membentuk kesadaran politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi politik. Ketiga, politik sering digunakan sebagai alat pengontrol pendidikan, terutama dalam penetapan kurikulum dan penyebaran ideologi tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penting bagi setiap negara untuk memastikan politik yang diterapkan mendukung sistem pendidikan berkualitas, serta pendidikan dapat menciptakan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing.

I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan suatu negara, hubungan antara politik dan pendidikan merupakan aspek yang tidak terpisahkan (Aksan, 2022). Kedua bidang ini memiliki pengaruh yang saling timbal balik, dimana kebijakan politik mempengaruhi sistem pendidikan, sedangkan pendidikan juga berperan penting dalam pembentukan politik suatu bangsa. Tema ini penting untuk dianalisis karena memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat menjadi alat untuk memajukan bangsa, sekaligus bagaimana politik berfungsi untuk menentukan arah dan kebijakan pendidikan yang ada (Hoddin, 2020). Politik dan pendidikan memiliki aspek kehidupan sosial dan ekonomi suatu negara (Marzuqi S Ahid, 2023). Dalam

konteks ini, kita perlu melihat lebih dalam bagaimana hubungan tersebut berkembang dan saling memengaruhi dari waktu ke waktu.

Politik sebagai suatu sistem kekuasaan yang mengatur jalannya pemerintahan dan kebijakan suatu negara, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Pendidikan (Darussalam S Indra, 2021). Sistem pendidikan yang ada di suatu negara seringkali dipengaruhi oleh kebijakan politik yang berlaku, baik dalam hal alokasi anggaran, kurikulum, maupun pendekatan pedagogis yang digunakan (Fadlilah Wening Dwi Hastuti S Utama, 2019). Sebaliknya, pendidikan juga memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk pola pikir, karakter, dan kesadaran politik masyarakat. Melalui pendidikan yang

berkualitas, suatu negara dapat menciptakan generasi yang cerdas, kritis, dan sadar akan hak serta kewajibannya sebagai warga negara (Cahyani S Dewi, 2021).

Pada konteks hubungan timbal balik ini, perlu diperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi. Pertama, kebijakan politik dalam bidang pendidikan sering kali mencerminkan ideologi politik penguasa (Khamim et al., 2024). Kedua, sistem pendidikan yang baik dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten dan siap menghadapi tantangan global (Abdillah, 2024). Oleh karena itu, pendidikan dan politik sering kali dijadikan instrumen oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam perspektif ini, hubungan timbal balik antara keduanya menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

Pendidikan berperan dalam mempersiapkan individu untuk dapat berpartisipasi dalam politik. Dalam demokrasi (Nassa, 2024), misalnya, tingkat pendidikan yang baik akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, baik dalam pemilihan umum, pengambilan keputusan, maupun aktivitas politik lainnya. Selain itu, pendidikan juga berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran politik yang kritis, yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan sistem politik yang lebih sehat (Hoddin, 2020). Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan lebih mampu mengevaluasi kebijakan politik dan memberikan respons yang sesuai terhadap berbagai permasalahan yang ada.

Namun demikian, hubungan antara politik dan pendidikan juga tidak selalu berjalan mulus. Kadang-kadang, kebijakan politik yang diterapkan dapat membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Misalnya, kebijakan politik yang tidak berpihak kepada sektor pendidikan dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam kualitas pendidikan antara daerah kaya dan daerah miskin, atau antara kelompok sosial yang berbeda. Hal ini tentu akan menghambat proses pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara, serta memperburuk ketimpangan sosial yang ada.

Selain itu, dalam beberapa kasus, pendidikan justru digunakan untuk tujuan politik tertentu. Penguasa sering kali mengatur kurikulum pendidikan untuk membentuk pola pikir yang mendukung ideologi mereka (Khamim et al., 2024). Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya berfungsi sebagai media transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk kesadaran politik dan ideologi suatu

bangsa. Hal ini bisa berisiko menciptakan sistem pendidikan yang tidak objektif dan tidak dapat mendukung perkembangan kritis anak didik.

Dalam konteks Indonesia, hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Setiap perubahan politik yang terjadi di Indonesia, baik itu pemerintahan yang berganti atau perubahan undang-undang, selalu berimplikasi pada sistem pendidikan yang ada. Misalnya, sistem pendidikan yang bersifat sentralistik di era Orde Baru kemudian berubah menjadi lebih desentralistik pada era reformasi. Perubahan-perubahan kebijakan tersebut menunjukkan bagaimana politik dapat membentuk karakter dan arah sistem pendidikan suatu negara.

Hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan juga bisa dilihat dalam pengaruhnya terhadap pembentukan karakter bangsa. Pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui pendidikan, masyarakat akan diajarkan tentang pentingnya demokrasi, hak asasi manusia, serta kewajiban sebagai warga negara. Semua ini sangat bergantung pada arah kebijakan politik yang ada.

Politik pendidikan harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan pendidikan yang inklusif dan berbasis pada kebutuhan Masyarakat (Purba, 2024). Dalam hal ini, pendidikan bukan hanya menjadi sarana untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil, tetapi juga untuk membentuk karakter masyarakat yang sadar akan tanggung jawab sosial dan politiknya. Dengan demikian, hubungan antara politik dan pendidikan harus dijaga dengan baik agar kedua sektor ini dapat saling mendukung untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan.

Secara global dapat dimaknai bahwa, hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kedua bidang ini saling berinteraksi dalam membentuk masa depan bangsa. Pendidikan tidak hanya mempengaruhi pembangunan politik, tetapi juga menjadi cermin dari kebijakan politik yang diterapkan. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk memastikan bahwa politik yang diterapkan mendukung sistem pendidikan yang berkualitas, serta pendidikan dapat menciptakan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing. Hanya dengan

kerja sama antara kedua bidang ini, pembangunan suatu negara akan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian tulisan ini menggunakan Library Research atau disebut dengan riset literatur, yang mana riset literatur ini untuk memperoleh data penelitian, bersumber dari buku, serta jurnal, yang berkaitan dengan tema hubungan timbal balik politik dengan pendidikan. Dalam riset literatur ini peneliti berhadapan langsung dengan teks bukan dengan pengetahuan yang langsung turun kelapangan, walaupun demikian dalam riset literatur ini peneliti berusaha menelaah dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan tema tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Politik

Dalam bahasa Yunani politik dipahami sebagai polis yang memiliki arti kota, negara kota. Dari polis berkembang konsep polites yang memiliki makna warga negara serta konsep politikos yang berarti kewarganegaraan. Akar kata politik berasal dari bahasa Inggris politics yang bermakna bijaksana. Sehingga politik dapat dipahami sebagai suatu proses serta sistem penentuan maupun pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan negara dan warga dalam sebuah negara, seperti hal-hal yang terkait dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, serta kebijakan, pembagian dan pengalokasian nilai dalam masyarakat. Perlu dipahami bahwa politik memiliki arti ataupun pemahaman yang berbeda-beda, tentunya hal ini dipengaruhi berbagai faktor, seperti konteks penggunaan maupun unsur kepentingan dari penggunaannya (Eviany, 2019).

Politik merupakan rangkaian kegiatan dan proses yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan (Terdjo, 2019). Dalam kehidupan bernegara, politik memainkan peran sangat penting sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama melalui pengambilan keputusan kolektif. Politik modern ditandai dengan adanya sistem demokrasi, dimana rakyat memiliki kedaulatan untuk menentukan pemimpin dan kebijakan melalui pemilihan umum (Putri et al., 2023). Sistem ini memungkinkan terjadinya sirkulasi kekuasaan secara damai dan teratur, serta memberi ruang bagi

masyarakat untuk mengawasi dan mempengaruhi jalannya pemerintahan.

2. Pengertian Pendidikan

Pendidikan menurut undang-undang adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan tidak hanya terbatas pada kegiatan pembelajaran formal di sekolah atau institusi Pendidikan (Noventue et al., 2024). Pendidikan mencakup seluruh pengalaman belajar yang terjadi dalam kehidupan, baik melalui pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Proses ini berlangsung sepanjang hayat, dimulai sejak seseorang lahir hingga akhir hidupnya (Iswati, 2020).

3. Pengaruh Politik terhadap Sistem Pendidikan

Politik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sistem pendidikan di sebuah negara, karena politik menentukan kebijakan dan distribusi sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pendidikan (Inkiriwang, 2020). Kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah sangat dipengaruhi oleh ideologi politik yang berlaku pada suatu periode tertentu, dan hal ini akan mempengaruhi kualitas, arah, serta tujuan pendidikan itu sendiri (Hutabarat et al., 2024).

Politik berfungsi sebagai pengatur kebijakan dalam sistem pendidikan, dan keputusan politik yang diambil oleh pemerintah berperan besar dalam menentukan arah Pendidikan (Rozak S Az- Ziyadah, 2021). Pada setiap masa pemerintahan, kebijakan pendidikan yang diterapkan akan sangat dipengaruhi oleh ideologi politik yang dianut oleh penguasa. Ideologi politik ini seringkali akan menentukan bagaimana pendidikan diatur, nilai-nilai apa yang diajarkan, serta apa tujuan akhir yang ingin dicapai dari pendidikan itu sendiri.

kebijakan kurikulum Pendidikan sering kali menjadi alat bagi pemerintah untuk mempromosikan ideologi tertentu. Pada rezim otoriter, pendidikan dapat digunakan untuk menyebarkan dan memperkuat ideologi

pemerintah, mengajarkan masyarakat untuk mendukung sistem politik yang ada, serta membatasi ruang untuk perbedaan pendapat (Hutabarat et al., 2024). Misalnya, pada masa Orde Baru di Indonesia, pengajaran sejarah seringkali difokuskan pada aspek-aspek yang mendukung legitimasi pemerintahan Orde Baru, serta mengesampingkan pandangan dan peristiwa yang berlawanan dengan ideologi pemerintah saat itu.

Sebaliknya, dalam sistem politik demokratis, ada kecenderungan untuk merancang kurikulum yang mendukung kebebasan berpikir dan hak untuk berbeda (Istianah et al., 2023). Pendidikan lebih berorientasi pada pengembangan karakter individu yang mampu berpartisipasi dalam diskusi politik dan sosial secara bebas. Di Indonesia, pasca-reformasi, ada upaya untuk merombak kurikulum pendidikan agar lebih berbasis pada nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang lebih terbuka dan kritis terhadap perkembangan sosial dan politik (Idris et al., 2014).

4. Pengaruh Pendidikan terhadap Politik

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pola pikir dan kesadaran politik Masyarakat (Hidayah et al., 2024). Dengan pendidikan yang baik, individu tidak hanya memperoleh keterampilan profesional, tetapi juga kemampuan untuk berpikir secara kritis, memahami hak-hak mereka, dan berpartisipasi aktif dalam sistem politik. Dampak dari hubungan ini sangat signifikan, karena pendidikan menjadi dasar bagi masyarakat untuk terlibat dalam kehidupan politik, meningkatkan kualitas demokrasi, dan memperkuat kesadaran social (Rasjid et al., 2024).

Salah satu dampak paling jelas dari pengaruh pendidikan terhadap politik adalah tingkat partisipasi politik Masyarakat (Mii et al., 2023). Negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi (Alfarisyi et al., 2023). Masyarakat yang teredukasi dengan baik lebih mampu memahami isu-isu politik dan ekonomi, serta memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap hak-hak politik mereka. Sebagai hasilnya, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pemilu, diskusi publik,

dan bahkan terlibat dalam pembuatan keputusan politik.

Pendidikan memiliki peran fundamental dalam mengembangkan pemahaman tentang demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia (Sila, 2024). Dengan mengajarkan nilai-nilai ini sejak dini, pendidikan menciptakan individu yang memiliki kesadaran politik dan sosial yang lebih tinggi. Para individu ini menjadi lebih siap untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah, mengkritik ketidakadilan sosial, dan bahkan terlibat dalam gerakan sosial atau perubahan politik yang konstruktif.

Di banyak negara demokratis, pendidikan kewarganegaraan berfokus pada pengajaran prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip dasar negara, individu menjadi lebih cakap dalam menilai kebijakan publik dan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil dan transparan. Oleh karena itu, pendidikan adalah salah satu instrumen utama dalam memperkuat fondasi demokrasi dan menjaga agar nilai-nilai demokratis tetap hidup dalam masyarakat.

Pendidikan yang baik juga berfungsi untuk membentuk karakter warga negara yang aktif dan bertanggung jawab (Sofha et al., 2023). Individu yang menerima pendidikan yang berkualitas tidak hanya didorong untuk mencari kesuksesan pribadi, tetapi juga untuk menyadari tanggung jawab sosial dan politik mereka. Mereka dilatih untuk menjadi anggota masyarakat yang peduli terhadap isu-isu sosial dan politik, serta berperan aktif dalam membangun kehidupan bersama yang lebih baik.

Sistem pendidikan yang mengajarkan tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi, kesetaraan, dan hak asasi manusia akan menghasilkan warga negara yang tidak hanya pasif dalam menerima kebijakan pemerintah, tetapi juga aktif dalam berkontribusi terhadap perubahan positif dalam masyarakat. Ini dapat terlihat dalam berbagai bentuk partisipasi politik, mulai dari memilih dalam pemilu hingga terlibat dalam protes atau kampanye untuk mendukung perubahan kebijakan yang lebih adil.

5. Politik sebagai Alat Pengontrol Pendidikan

Pendidikan sering kali dianggap sebagai sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan

dan keterampilan kepada generasi muda. Namun, tidak jarang pendidikan juga digunakan sebagai alat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam banyak kasus, kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat memiliki tujuan yang lebih luas, yakni untuk memperkuat posisi politik penguasa atau membentuk ideologi yang sejalan dengan kepentingan politik yang ada (Hartono, 2016). Oleh karena itu, hubungan antara politik dan pendidikan sering kali saling terkait dan memengaruhi satu sama lain.

Sering kali, pendidikan digunakan untuk memperkenalkan dan menyebarkan ideologi tertentu kepada generasi muda (Kurniawan et al., 2024). Ini terutama terjadi dalam sistem pemerintahan yang otoriter atau totaliter, di mana kurikulum dan materi pendidikan dimanipulasi untuk mendukung kekuasaan yang sedang berkuasa. Sebagai contoh, pada masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia, pendidikan difokuskan pada pembentukan karakter nasional yang mendukung stabilitas politik pemerintah (Idris S Tolla, 2024). Kurikulum yang diajarkan banyak berfokus pada nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme yang menguntungkan pemerintah saat itu.

Selain itu, dalam rezim yang lebih otoriter, pemerintah sering kali membatasi kebebasan berpikir dan memperkenalkan ajaran yang mendukung ideologi politik tertentu. Pendidikan diubah menjadi alat untuk menanamkan kesetiaan kepada pemerintahan, sedangkan pembentukan pemikiran kritis dan pluralisme sering kali dibatasi atau bahkan dihilangkan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaannya.

Meskipun dalam sistem demokrasi pendidikan seharusnya lebih bebas dan terbuka, pengaruh politik dalam pendidikan tetap ada. Di negara-negara demokratis, pemerintah tetap memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan pendidikan, termasuk menetapkan standar, pedoman kurikulum, dan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan. Meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, intervensi politik ini kadang-kadang bisa memengaruhi objektivitas dan keberlanjutan pendidikan itu sendiri.

Salah satu cara politik mengontrol pendidikan adalah melalui penetapan kurikulum (Rozak S Az-Ziyadah, 2021).

Pemerintah sering kali memengaruhi apa yang diajarkan di sekolah dengan merumuskan kebijakan yang menentukan materi pendidikan yang harus dipelajari oleh siswa. Meskipun tujuan awal dari kebijakan pendidikan adalah untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman, pengaruh politik yang terlalu kuat dalam pengaturan kurikulum dapat menyebabkan pengajaran yang bias, terbatas, dan tidak seimbang (Rozak S Az-Ziyadah, 2021).

Salah satu dampak negatif dari intervensi politik dalam pendidikan adalah penghambatan inovasi dalam sistem Pendidikan (Tandirerung et al., 2024). Ketika kebijakan pendidikan terlalu dipengaruhi oleh politik jangka pendek, hal ini bisa menghalangi upaya-upaya reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Misalnya, pemerintah yang terlalu terfokus pada kepentingan politik mungkin akan mengabaikan kebutuhan mendesak untuk mengadopsi teknologi baru dalam pendidikan atau merumuskan kurikulum yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan global.

Selain itu, kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan politik daripada kebutuhan riil dalam dunia pendidikan dapat mengakibatkan stagnasi. Dengan demikian, politik dapat menjadi faktor penghambat bagi inovasi pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih efektif, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan memiliki peran yang sangat fundamental dalam pembangunan suatu negara. Politik memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah dan kebijakan pendidikan, termasuk dalam hal kurikulum. Sebaliknya, pendidikan berperan penting dalam membentuk kesadaran politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi politik. Namun, hubungan ini juga memiliki sisi negatif ketika politik terlalu dominan dalam mengontrol pendidikan, terutama ketika digunakan untuk kepentingan ideologi tertentu atau kekuasaan, yang dapat

menghambat perkembangan pemikiran kritis dan inovasi dalam pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk memperkuat hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan, guna mencapai sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkualitas, serta untuk mendorong partisipasi politik yang lebih tinggi di kalangan masyarakat. Beberapa saran tersebut antara lain:

1. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan politik dalam bidang pendidikan lebih berorientasi pada peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, bukan pada kepentingan politik jangka pendek.
2. Perlu dikembangkan sistem check and balance yang efektif antara politik dan pendidikan untuk mencegah penyalahgunaan pendidikan sebagai alat politik.
3. Institusi pendidikan harus diberi otonomi yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran, dengan tetap memperhatikan standar nasional pendidikan.
4. Perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan pendidikan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan pendidikan.
5. Pengembangan sistem pendidikan harus lebih fokus pada pembentukan karakter kritis dan demokratis, sehingga dapat menciptakan warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, F. (2024). Peran perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. *EDUCAZIONE: Jurnal Multidisiplin*, 1(1), 13–24.
- Aksan, R. (2022). Kekuasaan dan Politik Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 10(1), 17–27.
- Alfarisyi, M. D., Al Hasani, N., S Maulia, S. T. (2023). Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Melalui Pendidikan Demokrasi. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(1), 60–68.
- Cahyani, K., S Dewi, D. A. (2021). Peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter peserta didik agar menciptakan siswa yang berkualitas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 268–281.
- Darussalam, F. I., S Indra, A. B. (2021). Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu. *Jurnal Politik Profetik*, 9(2), 189–204.
- Eviany, E. (2019). *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya*. CV. Cendekia Press.
- Fadlilah Wening Dwi Hastuti, N., S Utama, M. P. (2019). *Politik dan Sistem Pendidikan Nasional: Pengaruh Politik terhadap Implementasi Kurikulum di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hartono, Y. (2016). Pendidikan dan kebijakan politik (Kajian reformasi pendidikan di Indonesia masa orde lama hingga reformasi). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 35–45.
- Hidayah, R. M. W., Abidin, E. S., Arifin, I., S Ahmad, M. R. S. (2024). Membangun Kesadaran Politik: Pentingnya Partisipasi Generasi Muda Di Era Digital. *EDUSOS: Jurnal Edukasi Dan Ilmu Sosial*, 1(02), 74–77.
- Hoddin, M. S. (2020). *Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra- Kemerdekaan hingga Reformasi*. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14(1), 15–30.
- Hutabarat, Y. V., Sijabat, D. P., S Andini, R. K. (2024). Indoktrinasi Pendidikan Pada Masa Orde Lama: Menanamkan Nilai Pancasila Dan Manipol/Usdek. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, 2(1), 23–32.
- Idris, M., S Tolla, I. (2024). Evolusi Sistem Pendidikan di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2), 1494–1505.
- Idris, M., Willya, E., S Evra, E. (2014). *PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL (Studi Analisis Pengembangan Pendidikan Multikultural di UIN Jakarta dan STAIN Manado)*. *Journal*, 107.
- Inkiriwang, R. R. (2020). Kewajiban negara dalam penyediaan fasilitas pendidikan kepada

- masyarakat menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Lex Privatum*, 8(2).
- Istianah, A., Maftuh, B., S Malihah, E. (2023). Konsep Sekolah Damai: Harmonisasi Profil Pelajar Pancasila Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Education and Development*, 11(3), 333–342.
- Iswati, I. (2020). LONG LIFE EDUCATION DALAM PERSPEKTIF HADITS (Suatu Tinjauan Pendidikan Sejak Pranal dan Analisis Terhadap Kualitas Hadits Pendidikan Sepanjang Hayat). *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 3(2), 126–147.
- Khamim, S., Iswantir, I., Siregar, N., S Yaldi, Y. (2024). Pengaruh dan tantangan pendidikan agama Islam dalam dinamika politik di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 2027–2042.
- Kurniawan, A., Mutiza, M., S Mawaddah, R. (2024). REVITALISASI PENDIDIKAN DI ERA DIGITAL DIGITAL: UPAYA MENUMBUHKAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN PADA GENERASI MUDA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN DAN LINGKUNGAN UIN SUSKA. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 5023–5030.
- Marzuqi, B. M., S Ahid, N. (2023). Perkembangan kurikulum pendidikan di indonesia: prinsip dan faktor yang mempengaruhi. *JoIEM (Journal of Islamic Education Management)*, 4(2), 99–116.
- Mii, R., Reza, M., S Latuda, F. (2023). Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 3(2), 139–153.
- Nassa, D. Y. (2024). Mewujudkan Generasi Melek Politik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045. *WASIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 5(2), 130–142.
- Noventue, R., Ginanjar, S., S Astutik, A. (2024). Hakikat Pendidikan: Menginternalisasikan Budaya Melalui Filsafat Ki Hajar Dewantara Dan Nilai-Nilai Pancasila Pada Siswa. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 2809–2818.
- Purba, G. (2024). Politik Kebijakan Agama Dalam Masyarakat Plural: Membangun Kerukunan Umat Beragama Melalui Pancasila. *Jurnal Tabgha*, 5(2), 68–83.
- Putri, N. H., Laia, A., S Laia, B. (2023). Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 66–80.
- Rasjid, A. R., Putri, D. S., Nona, N., Putri, C. T., Gatji, K., Amelia, P., Heriyanti, H., S Yinata, S. S. (2024). Pengembangan sikap positif dalam kesadaran sosial untuk membangun kohesi Di Masyarakat. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*.
- Rozak, A., S Az-Ziyadah, A. I. (2021). Kebijakan pendidikan di Indonesia. *Alim| Journal of Islamic Education*, 3(2), 197–208.
- Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8–14.
- Sofha, G. F., Nabila, I., Yusriyyah, M. Z., S Annisa, N. (2023). Peran pendidikan kewarganegaraan terhadap pembangunan karakter bangsa. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 408–420.
- Tandirerung, Y. T., SE, M., Hasiara, H. L. O., MM, M. P., S Fitri Wulandari, S. H. I. (2024). Pendidikan anti korupsi. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Terdjo, P. (2019). Demokrasi, Kebijakan Umum, dan Keputusan Politik. *Mimbar Administrasi*, 16(2), 116–134.